

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anneke Osse, *Memahami Pemolisian*, CV Rinam Antartika, Jakarta, 2007
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, PT. Galamedia Bandung Perkasa, Bandung, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Yuniarto, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*, Deepublish (grup penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta, 2016.
- Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- G. Ambar Wulan, *Polisi dan Politik Intelijen Kepolisian Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Hermawan Sulisty, *Polisi Janchuk*, Pensil-324, Jakarta, 2009.
- Inu Kencana Syafii dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2007.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV Utomo, Bandung, 2003.
- Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

B. Jurnal Hukum

- Awaloedin Djamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan: Isu-Isu Polri Dalam RUU Kammas*, Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 3, 2015.
- Kasman Tasaripa, *Tugas Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Vol. 1, 2013.
- Maria Ulfah, dkk, *“Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional maupun Personal*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2013, Universitas Katolik Prahayangan.
- Sarah Nuraini Siregar, *Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Penelitian Politik Vol.16 No. 1, Juni 2019.
- Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, *“Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1, 2016.
- Teguh Sudarsono, *Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*, Jurnal Millah Vol. IX No. 2, 2010.

C. Perundang-Undangan

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Perjanjian Kerja Sama Antara Bawaslu Republik Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Nomor: 0172/SJ/HM.02.00/IV/2019 (Bawaslu) dan Nomor: B/69/VI/2019 (Kepolisian) mengenai pengawasan terhadap netralitas Kepolisian Republik Indonesia pada pemilihan umum 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Surat Telegram Kapolri Nomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

D. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Drs. Maladi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) di Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil wawancara dengan dengan Bapak Yaumil Ikrom Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Hubal di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dengan Bapak Novri Saputra selaku bagian Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Pangkalpinang.

E. Internet

<https://kbbi.web.id> > netralitas, diakses pada tanggal 23 Maret 2019.

<http://ntmcpolri.info/tegaskan-netralitas-polri-kapolri-terbitkan-14-larangan-anggota-polri-pada-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 18 Juni 2019.

https://www.academia.edu/8901640/sistem_politik_di_Indonesia, diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a534b2f9f27f/bolehkah-anggota-polri-ikut-pilkada-simak-penjelasan-hukumnya/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.